



# JPK

JURNAL PENDIDIKAN KHUSUS

- Implementasi Pendidikan Inklusif bagi Anak Berkebutuhan Khusus dalam Sistem Persekolahan Nasional
- Rehabilitas Berbasis Kerja Bagi Siswa Tunagrahita Ringan Usia Produktif
- Inklusi dan Inovasi Pendidikan Berkebutuhan Khusus
- Perkembangabn Bahasa dan Gangguan Bahasa Pada anak Berkebutuhan Khusus
- Pengembangan dan Pengelolaan Program Pendidikan Individual Individualized Educational Program"/IEP bagi Anak Berkelainan di Sekolah Inklusif
- Peyelenggaraan Pendidikan Inklusif Membutuhkan Keseriusan Manajemen Sekolah
- Meningkatkan Kemampuan Membaca Pada Siswa Tunagrahita melalui Permainan Tradisional
- Penggunaan Media Benda Asli Untuk Meningkatkan Kemampuan Berhitung Anak Tunagrahita Katagori Sedang Kelas Dasar 3 di SLB Bakti Kencana Berbah

**Diterbitkan Oleh :**  
**JURUSAN PENDIDIKAN LUAR BIASA**  
**FIP UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**  
**KERJASAMA DENGAN HISPELBI**  
**(HIMPUNAN SARJANA PENDIDIKAN LUAR BIASA INDONESIA)**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**



**PENGURUS PENERBITAN JURNAL PENDIDIKAN KHUSUS**

Pengarah	: Prof. Dr. Achmad Daldiri, M.Hum ( Dekan FIP UNY)
Penanggungjawab	: Mujimin, M.Pd (Ketua Jurusan PLB)
Ketua Redaksi	: Dr.Ishartiwi
Wakil Ketua Redaksi	: Hermanto, M.Pd
Sekretaris Redaksi	: Nur Azizah, M.Ed Pujaningsih, M.Pd
Penyunting Ahli	: Prof. Sunardi, M.Sc. Ph.D dr. Darmawan, G Endang Supartini, M.Pd Tin Suharmini, M.Si
Penyunting Pelaksana	: Edi Purwanta, M.Pd Sari Rudiwati, M.Pd Purwandari, M.Si Dr. Ibnu Syamsi Drs. Heri Purwanto Nurdayati Praptiningrum, M.Pd
Desain	: Dr. Haryanto
Sirkulasi	: Sukinah, M.Pd

Alamat Redaksi:  
Jurusan Pendidikan Khusus, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta,  
Karangmalang, Yogyakarta 55281; Tlp : (0274) 586168 Psw. 317  
E-mail : jpk-plb@yahoo.com

## DAFTAR ISI

<b>Pembuka Dialog .....</b>	<b>i</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>ii</b>
Implementasi Pendidikan Inklusif bagi Anak Berkebutuhan Khusus dalam Sistem Persekolahan Nasional Ishartiwi .....	1
Rehabilitasi Berbasis Kerja bagi Siswa Tunagrahita Ringan Usia Produktif Haryanto .....	10
Inklusi dan Inovasi Pendidikan Berkebutuhan Khusus Ibnu Syamsi.....	25
Perkembangan Bahasa dan Gangguan Bahasa pada Anak Berkebutuhan Khusus Pujaningsih .....	42
Pengembangan dan Pengelolaan Program Pendidikan Individual <i>Individualized Educational Program</i> /IEP bagi Anak Berkelainan di Sekolah Inklusif Sari Rudiwati .....	54
Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Membutuhkan Keseriusan Manajemen Sekolah Hermanto .....	65
Meningkatkan Kemampuan Membaca pada Siswa Tunagrahita melalui Permainan Tadisional Muh Basuni.....	83
Penggunaan Media Benda Asli untuk Meningkatkan Kemampuan Berhitung Anak Tunagrahita Kategori Sedang Kelas Dasar 3 di SLB Bhakti Kencana Berbah Suparti.....	95

# IMPLEMENTASI PENDIDIKAN INKLUSIF BAGI ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS DALAM SISTEM PERSEKOLAHAN NASIONAL

Oleh: Ishartiwi

## *Abstrak*

Pendidikan inklusif memberikan layanan pendidikan berdasarkan variasi potensi peserta didik dalam satu lembaga pendidikan. Layanan ini sangat sesuai untuk anak berkebutuhan khusus (ABK) yang memiliki karakteristik unik dan bersifat individual. Pelaksanaan pendidikan inklusif saat ini masih belum selaras dengan sistem persekolahan nasional yang cenderung menerapkan sistem layanan standar (perlakuan sama untuk setiap individu dan ketuntasan belajar dengan tolok ukur Standar Nasional). Terkait dengan kondisi ABK yang memiliki berbagai keterbatasan dan kebutuhan belajar, maka dalam implementasi pendidikan inklusif di sekolah memerlukan modifikasi kurikulum, strategi pembelajaran, sistem penilaian hasil belajar dan manajemen persekolahan yang sesuai dengan kebutuhan layanan ABK

*Kata kunci: Pelaksanaan pendidikan inklusif, kurikulum inklusif, sekolah inklusif.*

## **Pendahuluan**

Kebijakan pendidikan inklusif merupakan “*sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya*” (Permendiknas, Nomor 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif). Secara konseptual dari sudut manajemen pendidikan inklusif sebagai salah satu implikasi adanya pergeseran layanan ABK dari *Medical Model* menuju *Social Disability Model* (Rayner, 2007). Ke dua pandangan tersebut menunjukkan keterkaitan sebuah “inti” dari pendidikan inklusif yaitu untuk memberikan hak pendidikan yang sama untuk semua orang tanpa membedakan kondisi individu. Di sisi lain penerapan prinsip hakekat pendidikan (sudut pandang filsafat) tentang layanan pendidikan untuk membantu individu mengembangkan potensi untuk beradaptasi hidup dilingkungannya.

Dari sudut pandang layanan ABK pendidikan inklusif juga mengandung makna memberikan kemudahan layana. Stainback & Stainback 1990 (dalam Sunardi, 1995) menjelaskan bahwa sekolah inklusif merupakan sekolah yang menampung semua murid dalam sekolah yang sama, dengan program pendidikan menantang, layak tetapi sesuai kebutuhan individu, tempat setiap anak diterima sebagai bagian anggota masyarakat agar

anak mencapai keberhasilannya dan terpenuhi kebutuhannya. Ini menunjukkan bahwa pendidikan inklusif sebagai suatu sistem yang memungkinkan ABK mendapatkan layanan dalam sekolah terdekat dengan lingkungan tempat tinggalnya. Dalam Sistem Pendidikan Nasional pendidikan inklusif juga sebagai salah satu wadah untuk mencapai ketuntasan Wajib belajar Sembilan Tahun serta untuk efisiensi layanan pendidikan.

Banyak harapan dari implementasi pendidikan inklusif, namun fakta menunjukkan masih terdapat banyak permasalahan dalam pelaksanaan pendidikan inklusif (Hasil diskusi dengan guru dan kepala sekolah penyelenggara inklusif peserta pelatihan di Yogyakarta, 2009). Beberapa permasalahan tersebut dapat diidentifikasi antara lain: (1) masih ada kesulitan menyelaraskan antara standar layanan persekolahan reguler yang selama ini berjalan dan variasi kebutuhan belajar ABK; (2) sekolah inklusif belum menerima siswa ABK; (3) sekolah belum mampu menyediakan program yang tepat, bagi ABK dengan kondisi kecerdasan di bawah rata-rata (tunagrahita); (4) belum ada sistem evaluasi hasil belajar (baik formatif dan sumatif) yang tepat sesuai kebutuhan ABK; (5) kurangnya sarana dan sumber belajar asesabilitas untuk mengakomodasi kebutuhan mobilitas dan belajar ABK; (6) belum semua guru reguler memiliki kompetensi memberikan layanan ABK dan masih minimnya guru khusus di sekolah inklusif, meskipun bukan suatu keharusan (indantik) antara guru khusus dan sekolah inklusif; (7) belum seluruh warga sekolah memiliki kesepahaman tentang pendidikan inklusif dan layanan ABK; (8) masih adanya anggapan keberadaan ABK akan mempengaruhi ketuntasan hasil belajar akhir tahun, akibatnya ABK dipindahkan di SLB menjelang ujian; (9) layanan inklusif masih belum menyatu dalam sistem dan iklim sekolah, sehingga ada dua label siswa ABK dan reguler; (10) belum semua pengambil kebijakan termasuk bidang pendidikan memahami tentang sistem inklusif; (11) secara pengelolaan pelaksanaan pendidikan inklusif kurang dipersiapkan dengan komprehensif; dan (12) belum optimalnya penyediaan bahan ajar sesuai kebutuhan ABK.

Menilik banyaknya permasalahan implementasi pendidikan inklusif tersebut menunjukkan masih perlunya penataan lebih komprehensif. Prinsip utama pendidikan masih memerlukan pengkajian sebagai dasar pelaksanaan. Dasar utama pendidikan inklusi adalah “ABK dan ketepatan mendapatkan layanan pembelajaran” (Sunardi,1995). Berkaitan dengan ini memang tidak mudah untuk mengubah sistem layanan pendidikan yang sudah melekat terutama dalam tingkatan praksis. Secara ideal

hal ini harus dimulai dari mengubah cara pandang tentang pendidikan dan proses pembelajaran, atau menunggu regenerasi pelaku pendidikan. Namun secara tahapan implementasi pendidikan inklusif perlu mulai dibangun untuk masuk dalam sistem pendidikan nasional. Minimal dapat dimulai beberapa hal sebagai tahapan awal untuk mengiring regulasi saat ini. Terkait dengan hal tersebut paparan tulisan ini memberikan gambaran awal tentang langkah penataan input pendidikan, pengembangan program layanan dan sistem evaluasi hasil belajar.

### **Pendidikan Inklusif Dalam Konteks Persekolahan Nasional**

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional yang didalamnya mengamanatkan tujuan dan fungsi pendidikan, termasuk sistem pendidikan untuk ABK. Dari undang-undang ini kemudian hadir berbagai peraturan tentang pendidikan salah satunya Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang mencakup delapan (8) standar. Inti kebijakan ini adanya sistem pendidikan yang bersifat umum sebagai tolok ukur minimal kualitas layanan pendidikan. Implementasi dari kebijakan tersebut diharapkan setiap layanan pendidikan dapat mencapai ketuntasan minimal.

Dari sisi pemikiran filosofi (Ki Hajar Dewantoro, 1997) memaknai pendidikan merupakan pengembangan potensi individu, sehingga layanan pendidikan menghargai pebedaan individu.

Secara konseptual pendidikan inklusif merupakan sistem layanan Pendidikan Luar Biasa (PLB) yang mempersyaratkan agar semua ABK dilayani di sekolah umum terdekat bersama teman se usianya. Dalam pendidikan inklusi menempatkan ABK *tingkat ringan, sedang dan berat* secara penuh di kelas biasa. *Inclusion* penyediaan layanan pendidikan dan (pendidikan lain-program khusus) bagi ABK pada waktu yang sama dengan anak normal (Sunardi, 1995). Idiologi pendidikan inklusif secara internasional dalam Konferensi Dunia tahun 1994 oleh UNESCO di Salamanca Spanyol dinyatakan dalam komitmen “Pendidikan Untuk Semua” . Komitmen ini menegaskan pentingnya memberikan pendidikan bagi anak, remaja, dan orang dewasa yang memerlukan pendidikan di dalam sistem pendidikan regular, menyetujui kerangka aksi pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus (Mohamad Sugiarmun dan MIF Baihaqi: Editor, 2009).

Pendidikan inklusif juga menciptakan suasana sekolah yang menghargai multicultural (Smith, 1998). Dalam hal ini prinsip pendidikan inklusif memberikan kesempatan kepada setiap individu untuk mengembangkan potensinya melalui layanan pendidikan yang tepat. Tinjauan tersebut mengungkap beberapa bukti sikap positif implementasi pendidikan inklusif yang oleh Norwich pendekatan ‘zero reject’ terhadap penyediaan pendidikan khusus. Lebih lanjut dijelaskan bahwa dalam layanan inklusif tentang sikap dan perspektif para guru yang terlibat dalam pembuatan penyediaan inklusif bagi ABK. Sikap guru sangat dipengaruhi oleh sifat dan beratnya kondisi ketidakmampuan yang dimiliki para siswa (Rayner, 2007). Inklusif juga merupakan “sistem layanan pendidikan yang menyatu tanpa batas”–Layanan Pendidikan Ideal (Perubahan tata nilai/budaya).

Prinsip layanan dalam pendidikan inklusif mencakup: (1) sekolah dengan Tetap berlabel ABK, layanan diberikan oleh guru kelas dan guru khusus bekerja secara tim; (2) sekolah tanpa berlabel ABK, layanan diberikan oleh guru kelas/mapel dibekali kompetensi bidang ke-PLB-an dan bekerja secara tim tetap; (3) pembelajaran di kelas dilakukan secara individual, meskipun ada beberapa anak mempunyai kebutuhan belajar yang sama; dan (4) pembelajaran berbasis multimodalitas dengan kurikulum multilevel. Dengan demikian pelaksanaan pendidikan inklusif memerlukan kefleksibelan pengelolaan dan bekerja tim untuk mencapai keberhasilan siswa.

Telaah konseptual tersebut di atas memberikan gambaran bahwa: *pertama*, inklusif sebagai pendidikan yang memberikan kesempatan yang adil kepada semua siswa untuk bisa mengakses pendidikan tanpa membedakan gender, etnik, status sosial dan kebutuhan khusus (kemampuan) pada semua level/jenjang pendidikan. *Kedua*, dalam sekolah inklusif menerapkan model multi input artinya tidak mengenal penolakan murid. Kondisi ini tentu berbeda dengan sistem seleksi siswa baru dalam persekolahan yang saat ini masih cenderung menggunakan seleksi peringkat nilai hasil kelulusan. *Ketiga*, program kurikulum dalam pendidikan inklusif berbasis kepada anak. Dalam haln ini tentu disesuaikan dengan kebutuaah ABK, sehingga kurikulum akademik dapat dipilah menjadi: (1) ABK dengan kemampuan akademik rata-rata dan di atas tinggi disiapkan kurikulum terpadu dg kurikulum normal atau kurikulum modifikasi; (2) ABK dengan kemampuan akademik sedang (di bawah rata-rata) disiapkan kurikulum kurikulum fungsional/vokasional; dan (3) ABK dengan kemampuan akademik sangat rendah disiapkan kurikulum pengembangan bina diri. Juga perlu disiapkan kurikulum

kompensatoris, yaitu kurikulum khusus untuk meminimalisasai *barier* pada setiap ABK sebelum belajar aspek akademik. Adapun pengembangan bahan ajar perlu memperhatikan pengembangan aspek akademik, berorientasi pada kebutuhan pasca sekolah, berorientasi pada kebutuhan anak untuk pengembangan keterampilan fungsional/vokasional, dan pengembangan kemampuan perilaku adaptif. Strategi pembelajaran bersifat individual (Program Pembelajaran Terindividualisasikan) dengan prinsip kemudahan, bertahap, kekonkritan dan pengulangan. Penyajian isi materi dalam pembelajaran dengan memanfaatkan berbagai sumber belajar dan kesiapan bantuan guru serta menerapkan kefleksibelan waktu belajar, serta dalam proses pembelajaran bekerjasama dengan pihak terkait (orangtua/wali ABK, masyarakat, nara sumber, guru, para medis, terapis dan dunia usaha). Penyelenggaraan pembelajaran dilaksanakan dalam kelas bersama-sama siswa regular dan ABK. *Keempat*, sistem evaluasi bersifat “FAIR”/adil disesuaikan dengan kemampuan siswa. Bagi siswa yang mamapu mengikuti evaluasi regular dievaluasi sesuai sistem evaluasi reguker, dengan memodifikasi inbstrumen jika diperlukan. Namun bagi siswa dengan program terindividualisasikan (PPI) maka evaluasi disesuaikan dengan PPI-nya. Hasil evaluasi selain dikonfersi dalam bentuk kuantitatif dan berbentuk deskriptif, yang menggambarkan pencapaian kinerja. Khusus untuk ABK dengan kategori sedang dan berat hasil evaluasi bukan sebgai indikotor kenaikan jenjang pendidikan lanjut, tetapi sebagai tolok ukur peningkatan potensi kemandirian untuk kehidupan di lingkungannya.

### **Beberapa Pertimbangan Implementasi Pendidikan Inklusif**

Implementasi pendidikan inklusif dalam persekolahan nasional memerlukan perubahan total manajemen persekolahan. Namun aspek ini belum merupakan bahasan dalam paparan ini. Persiapan awal yang komprehensif mencakup komponen yang kompleks sangat penting dilakukan untuk penyelenggaraan pendidikan inklusif. Pelaksanaan program pendidikan khusus dilaksanakan secara kolaboratif antara guru umum/guru mata pelajaran dengan guru bidang PLB (sering disebut guru khusus). Dalam hal ini ada beberapa hal untuk dipertimbangkan daalm mengawli pelaksanaan pendidikan inklusif, anantara lain:

1. Mengkaji komponen sistem pendidikan nasional untuk dasar penyelarsan atau memodifikasi sesuai ABK



2. Sekolah memiliki sistem rekrutmen siswa terbuka hanya mempertimbangkan daya tampung. Untuk tahap awal sekolah dapat membatasi tipe ABK yang diterima (baru menerima ABK dengan kekhususan fisik dan kemampuan akademik rata-rata atau di atas rata-rata).
3. Sekolah menyiapkan program kurikulum sesuai masalah dan kebutuhan ABK yang dikembangkan berdasarkan hasil asesmen kondisi ABK dan sumber daya sekolah. Kurikulum dan pelaksanaannya bersifat fleksibel.
4. Pembelajaran lebih ditekankan membantu ABK bertahan hidup pasca sekolah, dengan tujuan agar ABK mampu beradaptasi di lingkungannya sesuai dengan kemampuan dan berfungsi untuk mengembangkan potensi setiap anak. Sekolah juga menerapkan sistem evaluasi hasil multi aspek dan multi cara.
5. Profil sekolah inklusif : menciptakan dan menjaga layanan kelas yang menjaga keragaman, penerapan kurikulum yang multilevel dan multi modalitas, menyiapkan dan mendorong guru untuk mengajar secara interaktif, melibatkan orang tua secara bermakna dalam proses perencanaan, dan sekolah Inklusif “tidak ada penolakan terhadap siswa dengan kondisi apapun”
6. Langkah sekolah awal penyelenggaraan pendidikan inklusif:
  - a. menyiapkan iklim sekolah inklusif, penyamaan persepsi terhadap warga sekolah,
  - b. penyiapan program layanan baik untuk mapel dan program khusus untuk ABK, penyiapan tenaga guru, dan tenaga lain yang dibutuhkan untuk melayani ABK
  - c. persiapan manajemen sekolah yang inklusif
  - d. persiapan Sarana prasana yang inklusif.
  - e. bekerjasama dengan sekolah SLB, untuk kasus ABK yang mengalami kesulitan
  - f. menyelenggarakan pendidikan inklusif bukan berbasis proyek
  - g. menyiapkan sistem evaluasi yang adil
  - h. menyiapkan lingkungan dan sarana aksesibilitas.
  - i. melakukan temu kelembagaan sekolah inklusif secara periodik

## **Penutup**

Pendidikan inklusif sebagai suatu sistem layanan ABK menyatu dalam layanan pendidikan formal. Konsep ini menunjukkan hanya ada satu sistem pembelajaran dalam sekolah inklusif, tetapi mampu mengakomodasi perbedaan kebutuhan belajar setiap individu. Dalam Sistem persekolahan Nasional yang selama ini masih cenderung menerapkan layanan pembelajaran dengan “model ketuntasan hasil belajar bersama” melalui bentuk belajar klasikal berdampak kurang memberikan kefleksibelan penerapan pendidikan inklusif, terutama bagi ABK dengan kondisi kemampuan mental rendah. Di sisi lain dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif memerlukan layanan pembelajaran sebanyak variasi kondisi ABK. Variasi layanan tersebut perlu diikuti dengan dukungan sumber daya sarana belajar dan sumber daya pendidik serta warga sekolah yang mampu memberikan layanan ABK.

Dengan demikian langkah persiapan sebagai aspek sangat penting untuk penyelenggaraan pendidikan inklusif. Persiapan komprehensif mencakup kesiapan program layanan akademik dan non-akademik, sarana dan pendidik serta iklim persekolaha, kesepahaman warga sekolah, termasuk juga sistem seleksi siswa baru yang dapat megakomodasi ABK dalam sistem layanan sekolah, Pada tahap pemula implementasi pendidikan inklusif dapat membatasi input siswa ABK sesuai kesiapan sekolah. Artinya sekolah tidak harus menerima semua tipe ABK tetapi dibatasi ABK dengan karakteristik tertentu, agar dapat memberikan layanan optimal (misal hanya mereima ABK dengan tipe gangguan pengelihatan dan kecersan rata-rata). Aspek penting lainnya yang perlu disiapkan adalah sistem evaluasi hasil belajar, terutama sekolah inklusif yang memiliki ABK dengan gangguan perkembangan mental. Dalam pendidikan inklusif selayaknya diterapkan sistem evaluasi regular, evaluasi modifikasi (dari segi instrumen) dan evalusi individual. Implementasi pendidikan inklusif memerlukan perubahan manajemen sistem persekolahan dan komitmen bagi pelaku pendidikan pada tingkat pengambil kebijakan dan praksis.

## Daftar Pustaka

- Draf Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia, tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa
- Ki Hajar Dewantoro. 1997. *Pendidikan*. Cetakan Kedua. Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa. Yogyakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- Rayner Steve, 2007. *Managing Special and Inclusive Education*. SAGE Publication Ltd. London.
- Smit David, J. 1998. *Inklusi: Sekolah Ramah Untuk Semua*. Terjemahan: Denis, Ny.Enrica. Editor : Mohamad Sugiarmun dan MIF Baihaqi. 2009. Nuansa. Bandung.
- Sunardi. 1995. *Kecenderungan Dalam pendidikan Luar iasa*. Dikti. Depdikbud. Jakarta.
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Vaughn dan Bos cs dan Schumm.,JS (2000). *Teaching Exeptional, Diverse and At-Risk Students in the General Education Classroom*. Needham Heights,MA. Allyn & Bacon.